

# RENCANA KERJA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM



## TAHUN 2019





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : P. 5/P2SDM/SET/REN.0/11/2018

TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2019, serta penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nomor P.5/SETBP2SDM/2015, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/menlhk/setjen/kum.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2019.

#### Pasal 1

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2019 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2019 ini menjadi pedoman dan dasar bagi seluruh unit kerja di lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2018

**KEPALA BADAN,**



**Ir. HELMI BASALAMAH, M.M.**  
**NIP. 19611119 198802 1 001**

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



# PENGANTAR

## KEPALA BADAN P2SDM

**T**ahun 2019 menjadi tahun terakhir pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara maksimal, Badan P2SDM selalu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata serta mendukung seluruh Eselon I lain di KLHK.

Pada tahun ini, *refocusing* dilakukan dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sesuai Renja Kementerian LHK, Penyusunan Rencana Kerja Badan P2SDM juga telah memperhatikan beberapa hal yaitu perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui sistem *e-planning* (KRISNA); perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Sejak tahun 2017, Badan P2SDM selalu berperan dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Pada Tahun 2017, Badan P2SDM berperan dalam 3 Prioritas Nasional. Setelah penajaman di Tahun 2018, Badan P2SDM mendukung ke dalam 3 Prioritas Nasional, sedangkan pada Tahun 2019, Badan P2SDM akan mendukung dalam 3 Prioritas Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM untuk dapat mewujudkan target-target yang telah disusun di Tahun 2019. Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita semua agar selalu dapat bekerja dan memenuhi tujuan yang diharapkan. Akhir kata, Selamat bekerja, dan tanamkan selalu sikap integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Kepala Badan P2SDM



**Ir. Helmi Basalamah, MM**

# DAFTAR ISI

	Hal
Peraturan Kepala Badan P2SDM .....	i
Pengantar Kepala Badan P2SDM .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3 Struktur Organisasi SDM .....	2
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018 .....	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018 .....	6
2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	13
III. Rencana Kerja Tahun 2019 .....	18
3.1 Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019 .....	18
3.2 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019 .....	23
IV. Penutup .....	25
V. Lampiran .....	26
Pustaka .....	39

# DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM .....	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkup Badan P2SDM .....	4
Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Golongan .....	5
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	5
Tabel 5. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM .....	6
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2017 .....	7
Tabel 7. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan P2SDM Tahun 2017 .....	8
Tabel 8. Prioritas Nasional BP2SDM Tahun 2018 .....	9
Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan per Satuan Kerja Badan P2SDM Tahun 2018 .....	10
Tabel 10. Capaian IKP BP2SDM hingga bulan Oktober 2018 .....	11
Tabel 11. Capaian IKK BP2SDM hingga bulan Oktober 2018 .....	11
Tabel 12. Perubahan Pagu Anggaran APBN dan APBN-P Per Kegiatan Badan P2SDM Tahun 2017 .....	13
Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2017	13
Tabel 14. Realisasi Keuangan pada Satker lingkup Badan P2SDM .....	14
Tabel 15. Distribusi alokasi anggaran APBN per satker lingkup BP2SDM .....	15
Tabel 16. Alokasi anggaran APBN-P per masing – masing satker lingkup BP2SDM Awal dan Oktober 2018 .....	15
Tabel 17. Prognosis Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM hingga Desember 2018 .....	16
Tabel 18. Alokasi Anggaran Tahun 2019 per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu Anggaran .....	17
Tabel 19. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas nasional 1 .....	18
Tabel 20. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas nasional 3 .....	20
Tabel 21. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas nasional 4 .....	21
Tabel 22. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2019 .....	22
Tabel 23. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2019 .....	22
Tabel 24. Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan jenis belanja dan sumber dana (dalam ribuan rupiah) .....	24
Tabel 25. Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM .....	24





# DAFTAR GAMBAR

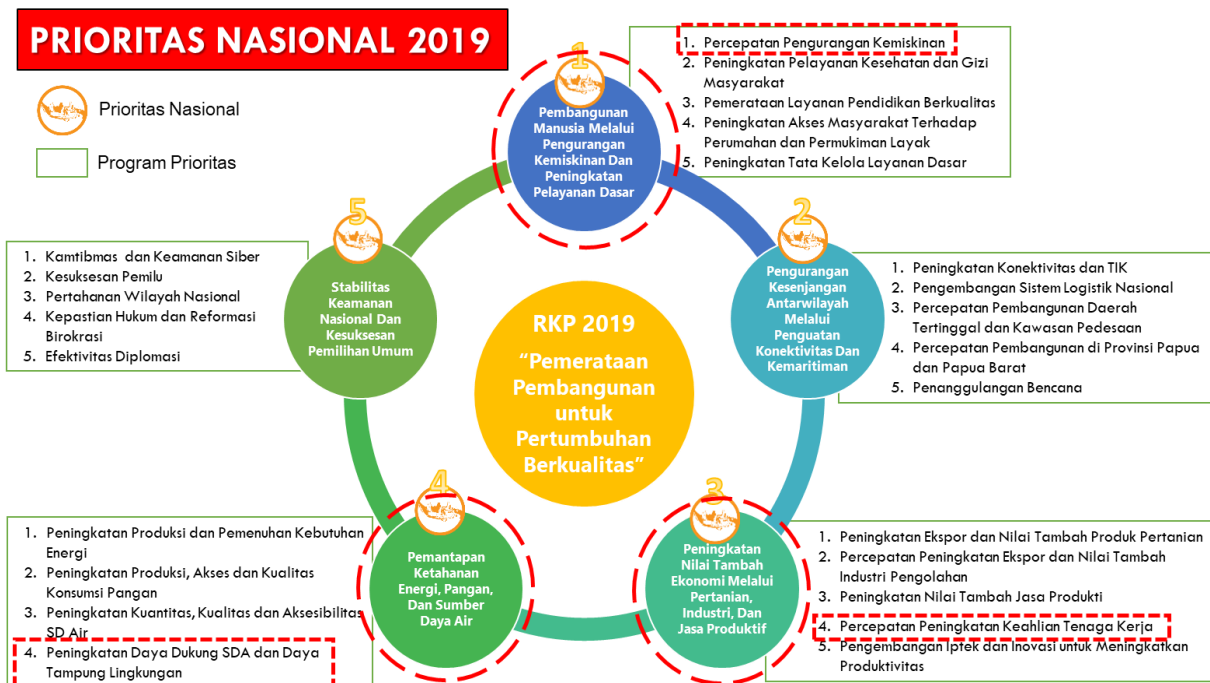
	Hal
Gambar 1. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional Tahun 2019 .....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM .....	3
Gambar 3. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 1 .....	18
Gambar 4. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 3 .....	19
Gambar 5. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 4 .....	20

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme aplikasi *e-planning* KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dengan mengacu pada Renstra Badan P2SDM, dokumen awal Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, serta pagu anggaran Tahun 2019. Seperti tahun sebelumnya, pendekatan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 tetap menggunakan prinsip tematik, holistik, integratif dan spasial.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode pembangunan jangka menengah Tahun 2015-2019 yang juga menjadi penentu nilai keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama ini. Untuk mendukung capaian keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, Badan P2SDM mendukung dalam hal pencapaian keberhasilan target pada setiap kegiatan yang dilakukan. Prioritas Nasional (PN) mengalami *refocusing* yang semula pada tahun 2018 terdapat 10 PN menjadi hanya 5 PN pada Tahun 2019. PN ini dijabarkan lebih rinci ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Nasional (ProP) dan Proyek Prioritas.



GAMBAR 1. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Tahun 2019 bertanggung jawab pada 4 dari 5 Prioritas Nasional melalui 13 Program Kementerian LHK. Badan P2SDM mendukung pencapaian 3 Prioritas Nasional melalui 3 Program Prioritas seperti pada Gambar 1. Selanjutnya Program Prioritas tersebut dijabarkan lebih detail melalui 4 Kegiatan Prioritas, 5 Proyek Prioritas Nasional dan 10 Proyek Rincian Proyek K/L.

Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran kegiatan dan strategi pelaksanaan untuk mencapai keberhasilan target yang telah ditentukan. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Badan P2SDM memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, struktur organisasi Badan P2SDM seperti yang tercantum pada Gambar 2 berikut.



GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung pula oleh 5 unit kerja eselon II meliputi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Pusat Penyuluhan dan Sekretariat Badan. Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 12 UPT yang terdiri dari 7 Balai Diklat LHK dan 5 SMK Kehutanan Negeri.

TABEL 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
<b>A. Pusat</b>			
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Serpong	
4.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	
<b>B. UPT Balai Diklat LHK (PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)</b>			
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat



No	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
<b>C. SMK Kehutanan Negeri (PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)</b>			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

Jumlah total Pegawai Badan P2SDM secara keseluruhan sebanyak 1.392 orang yang terdiri dari 974 PNS dan 355 orang tenaga kontrak yang tersebar di unit kerja Pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

TABEL 2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DI LINGKUP BADAN P2SDM

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	4
3.	Eselon III	
	- Pusat	13
	- UPT (Balai Diklat LHK)	7
4.	Eselon IV	
	- Pusat	42
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	21
6.	Staf PNS/ASN	
	- Pusat	231
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	655
<b>Jumlah PNS (1-6)</b>		<b>974</b>
7.	Tenaga Kontrak	355
<b>Total Pegawai (1-7)</b>		<b>1.392</b>

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan P2SDM berjumlah 974 orang dengan rincian pada satker pusat sebanyak 291 orang dan pada satker di UPT sebanyak 253 orang. Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, rincian pegawai ASN lingkup Badan P2SDM disajikan pada Tabel 3 dan 4 berikut

TABEL 3. REKAPITULASI PEGAWAI BADAN P2SDM BERDASARKAN GOLONGAN

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	Golongan IV	49	69	24	26	168
2	Golongan III	92	231	90	130	543
3	Golongan II	26	159	10	46	241
4	Golongan I	0	19	0	3	22
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>478</b>	<b>124</b>	<b>205</b>	<b>974</b>

TABEL 4. REKAPITULASI PEGAWAI BADAN P2SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	S3	10	10	6	5	31
2	S2	51	85	24	32	192
3	S1/D4	50	134	62	76	322
4	D3	10	19	17	19	65
5	SLTA/D1/D2	39	189	12	67	307
6	SLTP	4	25	1	3	33
7	SD	3	16	2	3	24
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>478</b>	<b>124</b>	<b>205</b>	<b>974</b>



▲  
 ◀ KEGIATAN PADA ACARA HARI PERINGATAN  
 SAMPAH TAHUN 2018



# II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

## 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

### 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017

Sesuai dengan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 - 2019, program kerja Badan P2SDM adalah Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sasaran dari penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai *supporting system* bagi Eselon I lainnya di KLHK, Badan P2SDM memiliki 4 (empat) target indikator kinerja program (Tabel 5) untuk mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

TABEL 5. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2015-2019	Target 2017
Jumlah Tenaga Bakti Rimawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak, Dan SDM LHK Kompeten, 25.400 orang.	25.400 Orang	710 Orang
Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya, 57.640 orang.	57.640 Orang	4.031 orang
Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya, 71.200 Orang, dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	71.200 Orang	2.150 orang
	5.000 Unit Sekolah/Kampus	500 Unit Sekolah/Kampus
Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	5.500 Unit KTH	460 Unit KTH

Secara lebih terperinci, Indikator Kinerja Program tersebut dijabarkan melalui 5 (lima) butir kegiatan utama dan 1 (satu) butir kegiatan dukungan manajemen, yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Berdasarkan 4 indikator kinerja dari Tabel 5 di atas, kegiatan pada badan P2SDM dijabarkan lebih lanjut melalui 17 indikator kinerja kegiatan seperti yang tercantum pada Tabel 6.

TABEL 6. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2017

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<p><b>Perencanaan dan Pengembangan SDM</b>                      Sasaran:  <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten</i></p>	<p>a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH, <i>210 orang</i>                      b) Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya <i>500 orang</i></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK</b>                      Sasaran:  <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i></p>	<p>a) Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat <i>3.000 Orang</i>                      b) Jumlah SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa (S2 dan S3), <i>85 orang</i>                      c) Jumlah KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan, <i>2 unit KHDTK</i>                      d) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan yang Meningkatkan Kapasitasnya, <i>210 orang</i>                      e) Jumlah Tenaga Pendamping KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Hutan Meningkatkan Kapasitasnya, <i>300 orang</i></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>                      Sasaran:  <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i></p>	<p>Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan <i>sebanyak 436 orang</i></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</b>                      Sasaran:  <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan</i></p>	<p>a) Jumlah Kader Lingkungan Hidup Meningkatkan Kapasitasnya, <i>600 orang</i>                      b) Jumlah Generasi Muda LH Meningkatkan Kapasitasnya, <i>550 orang</i>                      c) Jumlah Sekolah/Kampus Yang Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) <i>500 Unit Sekolah/Kampus</i>                      d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli Dan Berbudaya LH, <i>1.000 orang</i></p>
<p><b>Peningkatan Penyuluhan</b>                      Sasaran:  <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i></p>	<p>a) Jumlah Kelas Kelompok Tani Desa-Desa Hutan dari Tingkatan Pemula ke Madya, <i>450 unit KTH</i>                      b) Jumlah Koperasi KTH yang Dibentuk, <i>10 unit</i>                      c) Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), <i>10 unit</i>                      d) Jumlah Tenaga Pendamping Handal Bagi KTH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Hutan, <i>300 orang</i></p>
<p><b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>                      Sasaran:  <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i></p>	<p>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal <i>82,00 (A)</i></p>

Pada Tahun 2017, capaian kinerja Badan P2SDM sebesar 103,29% seperti yang tercantum pada Tabel 7 berikut. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 yaitu 100,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2017 lebih efektif dan efisien dari tahun sebelumnya. Namun, apabila dilihat total capaian selama 3 Tahun (2015 – 2017) dan disandingkan dengan target Renstra BP2SDM Tahun 2015 –

2019, capaian tersebut masih bernilai 17,23 – 37,25%. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran BP2SDM yang ditetapkan selama 3 Tahun tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun pada Renstra BP2SDM.

TABEL 7. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BADAN P2SDM TAHUN 2017

Program	Sasaran	Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2015 - 2019	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Capaian
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	1) Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit	460 Unit KTH	460 Unit KTH	100,00
	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	2) Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	710 orang	740 orang	104,23
		3) Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang	4.031 orang	4.024 orang	99,83
		4) Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya 71.200 orang dan 5.000 Unit Sekolah/Kampus yang berbudaya lingkungan	2.150 orang	2.386 orang	110,98
			500 Unit Sekolah/Kampus	536 Unit Sekolah/Kampus	107,20
<b>Rata-rata Kinerja Badan P2SDM</b>					<b>103,29</b>

## 2.1.2 Indikator Kinerja dan Prognosis Tahun 2018

Pada Tahun 2018, fokus pembangunan nasional dirangkum dalam 10 Prioritas Nasional. Dari kesepuluh Prioritas Nasional tersebut, Badan P2SDM termasuk ke dalam 3 Prioritas Nasional yaitu **Pendidikan**, **Penanggulangan Kemiskinan** dan **Pembangunan Wilayah**. Kegiatan BP2SDM yang mendukung Prioritas Nasional Pendidikan adalah kegiatan *Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dan Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan Lainnya*. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian tersebut adalah melalui pembentukan lulusan siswa SMKKN menjadi cakap dalam berwirausaha atau memiliki jiwa *entrepreneurship*. Selain itu,

dilakukan pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat di 4 (empat) Balai Diklat yaitu adalah Kadipaten, Makassar, Samarinda, dan Pekanbaru. Hal ini dilakukan agar siswa SMK juga dapat menggunakan KHDTK sebagai salah satu lokasi praktek.

Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan adalah *peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya*. Lokasi yang dipilih disesuaikan dengan lokasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang menjadi isu utama Tahun 2018. Sedangkan strategi Badan P2SDM dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan wilayah melalui kegiatan *Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal*.

TABEL 8. PRIORITAS NASIONAL BP2SDM TAHUN 2018

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja
<b>I. PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN</b>		
<b>Program Prioritas:</b> Pendidikan Vokasi		
<b>Kegiatan Prioritas:</b> Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja		
<b>Proyek Prioritas Nasional:</b> Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja		
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan
<b>Kegiatan Prioritas :</b> Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas		
<b>Proyek Prioritas Nasional:</b> Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi		
2.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan Lainnya
<b>II. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>		
<b>Program Prioritas:</b> Peningkatan Daya Saing UMKM dan Operasi		
<b>Kegiatan Prioritas :</b> Perluasan Akses Pembiayaan		
<b>Proyek Prioritas Nasional :</b> Peningkatan Modal Usaha bagi KUMKM dan Kelompok Usaha		
3.	Peningkatan Penyuluhan	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya
<b>III. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH</b>		
<b>Program Prioritas Nasional :</b> Pembangunan Perdesaan		
<b>Kegiatan Prioritas :</b> Pengelolaan SDA Desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan		
<b>Proyek Prioritas Nasional :</b> Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan		
4.	Peningkatan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH

Setiap kegiatan di Badan P2SDM memiliki indikator kinerja kegiatan (IKK) masing-masing. Hasil capaian dari masing-masing IKK tersebut diukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Pada Tahun 2018 terdapat satu Indikator kinerja kegiatan yang mengalami perubahan target pada perjalanannya. Dari yang semula pada dokumen Renja BP2SDM sebanyak 2.679 orang, menjadi 2.996 orang

(pada Bulan Oktober 2018). Hal ini disebabkan terdapat penambahan jumlah diklat di Pusdiklat SDM LHK.

TABEL 9. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PER SATUAN KERJA BADAN P2SDM TAHUN 2018

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
<p><b>Perencanaan Pengembangan SDM</b> Sasaran: Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten</p>	<p>a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, <b>440 orang</b> (<i>pembiayaan rekrutmen baru sebanyak 230 orang</i>)</p> <p>b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya <b>700 orang</b></p>
<p><b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK</b> Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK</p>	<p>a. Jumlah SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, <b>2.996 orang</b></p> <p>b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), <b>85 orang</b></p> <p>c. Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya, <b>4 unit KHDTK</b></p> <p>d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, <b>230 orang</b></p> <p>e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di Desa-Desa Hutan meningkat kapasitasnya, <b>300 orang</b></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b> Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</p>	<p>Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak <b>457 orang</b></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup</b> Sasaran: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan hidup</p>	<p>a. Jumlah kader lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya, <b>375 orang</b></p> <p>b. Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang meningkat kapasitasnya, <b>4.100 orang</b></p> <p>c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan, <b>380 unit sekolah/kampus</b></p> <p>d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan hidup, <b>500 orang</b></p>
<p><b>Peningkatan Penyuluhan</b> Sasaran: Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</p>	<p>a. Peningkatan jumlah kelas kelompok tani Desa-Desa hutan meningkat dari tingkatan pemula ke madya, <b>367 unit</b></p> <p>b. Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, <b>10 unit</b></p> <p>c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), <b>10 unit</b></p> <p>d. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH, <b>200 orang</b></p>
<p><b>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b> Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal <b>83,00 (A)</b>.</p>

Berdasarkan hasil laporan yang telah disusun, capaian kinerja Badan P2SDM hingga Bulan Oktober Tahun 2018 telah mencapai 79,23%. Secara terperinci, capaian IKP tersebut dapat dilihat pada Tabel 10. Beberapa kendala pencapaian kegiatan BP2SDM diantaranya a) waktu pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda; b) belum cairnya dana fasilitasi peningkatan kelas KTH dan pembentukan koperasi KTH karena masih ada yang belum menyerahkan laporan kemajuan kegiatan.

TABEL 10. CAPAIAN IKP BP2SDM HINGGA BULAN OKTOBER 2018

Target IKP 2015-2019	Target 2018	Realisasi s/d Oktober 2018	% Capaian
1. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak Dan SDM LHK Kompeten (25.400 orang).	1.140 orang	1.043 orang	91,49
2. Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya (57.640 orang).	4.036 orang	3.839 orang	95,11
3. Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya (71.200 orang) dan 5.000 unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	4.975 orang	4.442 orang	89,29
	380 unit	0 unit	0,00
4. Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya (5.500 unit KTH dan Koperasi).	377 unit	323 unit	85,68

IKP Badan P2SDM tersebut kemudian dijabarkan melalui 6 kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berdasarkan hasil capaian yang ada, hingga bulan Oktober 2018 kegiatan Badan P2SDM yang sudah memenuhi target 100% sebanyak 5 (lima) kegiatan dari 17 IKK yang ada. Selain itu 5 (lima) kegiatan lain juga sudah memenuhi capaian realisasi melebihi 90%. Dilihat dari hasil capaian tersebut, prognosis capaian IKK Badan P2SDM ditargetkan dapat mencapai 99% pada akhir Desember 2018. Secara terperinci, rincian capaian IKK hingga bulan Oktober Tahun 2018 tersebut tercantum pada Tabel 11 berikut.

TABEL 11. CAPAIAN IKK BP2SDM HINGGA BULAN OKTOBER 2018

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi s.d Oktober 2018	% Capaian
1. Perencanaan Pengembangan SDM	<b>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak &amp; SDM LHK kompeten</b>			
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	440 orang	402 orang	91,36%
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang	700 orang	641 orang	91,57%
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	<b>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</b>			
	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan non Aparatur yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	2.996 orang	2.801 orang	93,49%
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang	85 orang	53 orang	62,35%
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	4 unit	4 unit	100,00%



Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi s.d Oktober 2018	% Capaian
	d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang	230 orang	230 orang	100,00%
	e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang	300 orang	300 orang	100,00%
<b>3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>	<b>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</b>			
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	457 orang	455 orang	99,56%
<b>4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan</b>			
	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang	375 orang	284 orang	75,73%
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	4.100 orang	3.585 orang	87,44%
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus	380 unit	0 unit	0,00%
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang	500 orang	573 orang	114,60%
<b>5. Peningkatan Penyuluhan</b>	<b>Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</b>			
	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	367 unit	315 unit	85,83%
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit	10 unit	8 unit	80,00%
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit	10 Unit	7 unit	70,00%
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di desa – desa hutan, 5.000 orang	200 orang	200 orang	100,00%
<b>6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pad Badan P2SDM</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi</b>			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	83 Poin	80,84 Poin	97,40%

## 2.2 CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

### 2.2.1 Serapan Anggaran Program Tahun 2017

Pada Tahun 2017 alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp307.831.468.000,-. Pada perjalanannya, terdapat perubahan pagu pada setiap Eselon I di lingkup Kementerian LHK melalui surat Menteri LHK nomor S.260/MENLHK/SETJEN/SET1/7/2017 tentang Usulan revisi APBN-P Kementerian LHK TA. 2017. Berdasarkan penghematan, penyesuaian belanja pegawai serta tambahan hibah langsung di satker SMKKN, pada akhir Tahun 2017, pagu APBN-P Badan P2SDM menjadi sebesar Rp303.549.693.000,-. Rincian pagu APBN dan APBN-P pada masing-masing kegiatan lingkup Badan P2SDM terdapat pada Tabel 12 berikut.

TABEL 12. PERUBAHAN PAGU ANGGARAN APBN DAN APBN-P PER KEGIATAN BADAN P2SDM TAHUN 2017.  
dalam ribuan rupiah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	
		APBN	APBN-P
<b>Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>		<b>307.831.468</b>	<b>303.549.693</b>
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	41.961.300	41.886.300
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	128.762.600	127.192.866
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	85.200.000	84.247.500
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	13.700.000	13.439.285
5	Peningkatan Penyuluhan	8.450.000	8.350.000
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	29.757.568	28.433.742

Berdasarkan pagu terakhir Badan P2SDM Tahun 2017, capaian realisasi keuangan Badan P2SDM s.d 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp297.575.998.051,- atau sebesar 98,03%. Rincian capaian kinerja anggaran pada setiap kegiatan dan per masing-masing satuan kerja lingkup Badan P2SDM tersaji pada Tabel 13 dan 14 berikut.

TABEL 13. REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN LINGKUP BADAN P2SDM TAHUN 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp.	% APBN-P
<b>Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>		<b>303.549.693.000</b>	<b>297.575.998.051</b>	<b>98,03</b>
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM	41.886.300.000	41.882.645.036	99,99
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	127.192.866.000	125.279.425.772	98,50
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	84.247.500.000	80.436.858.883	95,48

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp.	% APBN-P
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	13.439.285.000	13.282.433.764	98,83
5	Peningkatan Penyuluhan	8.350.000.000	8.331.923.673	99,78
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	28.433.742.000	28.362.710.329	99,75

TABEL 14. REALISASI KEUANGAN PADA SATKER LINGKUP BADAN P2SDM TAHUN 2017

No	Satker	Pagu APBN-P	Realisasi	%
<b>Badan P2SDM</b>		<b>303.549.693.000</b>	<b>297.575.998.051</b>	<b>98,03</b>
1	Sekretariat Badan	28.433.742.000	28.362.710.923	99,75
2	Pusat Penyuluhan	8.350.000.000	8.331.923.673	99,78
3	Pusrenbang SDM	41.886.300.000	41.882.645.036	99,99
4	Pusdiklat SDM LHK	36.582.266.000	35.967.148.091	98,32
5	Puslatmas dan PGL	13.139.285.000	13.013.509.064	99,04
6	Balai Diklat LHK Bogor	13.740.000.000	13.685.141.000	99,60
7	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	12.522.800.000	11.979.299.476	95,66
8	Balai Diklat LHK Samarinda	11.827.800.000	11.682.481.813	98,77
9	Balai Diklat LHK Makassar	15.216.000.000	14.939.993.596	98,19
10	Balai Diklat LHK Pekanbaru	13.232.800.000	13.010.061.055	98,32
11	Balai Diklat LHK Kadipaten	13.500.000.000	13.424.131.757	99,44
12	Balai Diklat LHK Kupang	12.671.200.000	12.628.778.475	99,67
13	SMKK N Manokwari	16.855.000.000	15.249.079.397	90,47
14	SMKK N Kadipaten	16.010.000.000	15.636.135.490	97,66
15	SMKK N Makassar	17.188.440.000	15.952.801.416	92,81
16	SMKK N Samarinda	15.607.500.000	15.179.521.154	97,26
17	SMKK N Pekanbaru	16.786.560.000	16.650.636.634	99,19

## 2.2.2 Serapan Anggaran dan Prognosis Tahun 2018

Penyelenggaraan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp325.914.960.000,- dengan rincian RM sebesar Rp272.079.316.000,-, PNBK Rp. 48.497.817.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 5.337.872.000,-. Alokasi tersebut sesuai dengan surat Menteri LHK No. S.241/MENLHK/SETJEN/Set.1/7/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal RKA-KL Pagu Anggaran KLHK TA.2019 dan hasil pertemuan tiga pihak II (TM II) pada tanggal 25 Juli 2018.

Pada tahun berjalan terdapat beberapa perubahan pada alokasi tersebut, hal ini disebabkan adanya penyesuaian alokasi belanja pegawai tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KLHK serta terdapat tambahan hibah dalam negeri dari Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur pada satker SMKKN Samarinda. Rincian alokasi per masing-masing satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.

TABEL 15. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN APBN PER SATKER LINGKUP BP2SDM AWAL DAN OKTOBER 2018

No.	Satuan Kerja	Pagu Awal	Pagu (Oktober 2018)
<b>A. Satuan Kerja Pusat</b>			
1.	Sekretariat Badan P2SDM	45.725.437.000	33.107.315.000
2.	Pusat Penyuluhan	10.854.600.000	10.854.600.000
3.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	26.736.200.000	26.736.200.000
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	39.763.232.000	40.477.190.000
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	12.643.000.000	13.125.190.000
<b>B. UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)</b>			
1.	BDLHK Bogor	14.555.000.000	14.100.000.000
2.	BDLHK Pematangsiantar	11.488.000.000	11.813.000.000
3.	BDLHK Samarinda	12.571.000.000	12.671.000.000
4.	BDLHK Makassar	14.888.973.000	15.242.775.000
5.	BDLHK Pekanbaru	14.250.000.000	14.350.000.000
6.	BDLHK Kadipaten	13.207.000.000	13.157.000.000
7.	BDLHK Kupang	11.935.000.000	11.725.800.000
<b>C. UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)</b>			
1.	SMKKN Manokwari	20.369.750.000	17.467.253.000
2.	SMKKN Kadipaten	20.533.420.000	21.394.320.000
3.	SMKKN Makassar	18.865.000.000	19.630.500.000
4.	SMKKN Samarinda	17.462.348.000	18.689.880.000
5.	SMKKN Pekanbaru	20.067.000.000	20.717.000.000
<b>Jumlah A + B + C</b>		<b>325.914.960.000</b>	<b>315.259.023.000</b>

Hingga 31 Oktober tahun 2018 realisasi anggaran Badan P2SDM sudah mencapai 77,21% atau sebesar Rp243.419.848.131,-, sedangkan realisasi fisiknya sudah mencapai 78,40%. Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan antara lain waktu pelaksanaan yang tertunda, serta terdapat kendala pada pencairan dana kegiatan fasilitasi KTH. Secara rinci, realisasi per satuan kerja lingkup Badan P2SDM tercantum pada Tabel 16 berikut.

TABEL 16. CAPAIAN ANGGARAN DAN FISIK BADAN P2SDM HINGGA 31 OKTOBER 2018

No.	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Oktober 2018		
			Rupiah	%	% Fisik
<b>A. Satuan Kerja Pusat</b>					
1.	Sekretariat Badan P2SDM	33.107.315.000	23.552.553.388	71,14	71,42
2.	Pusat Penyuluhan	10.854.600.000	8.854.829.060	81,58	81,93
3.	Pusat Renbang SDM	26.736.200.000	19.337.628.492	72,33	73,19
4.	Pusat Diklat SDM LHK	40.477.190.000	31.627.535.488	78,14	78,51
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL	13.125.190.000	8.994.639.965	68,53	74,74

No.	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Oktober 2018		
			Rupiah	%	% Fisik
<b>B. UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)</b>					
1.	BDLHK Bogor	14.100.000.000	11.894.098.311	84,36	85,76
2.	BDLHK Pematangsiantar	11.813.000.000	9.891.824.889	83,74	86,29
3.	BDLHK Samarinda	12.671.000.000	10.544.910.825	83,22	83,69
4.	BDLHK Makassar	15.242.775.000	12.562.294.370	82,41	82,42
5.	BDLHK Pekanbaru	14.350.000.000	12.345.946.036	86,03	86,03
6.	BDLHK Kadipaten	13.157.000.000	11.046.031.415	83,96	84,07
7.	BDLHK Kupang	11.725.800.000	10.248.587.155	87,40	87,99
<b>C. UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)</b>					
1.	SMKKN Manokwari	17.467.253.000	11.910.603.942	68,19	76,11
2.	SMKKN Kadipaten	21.394.320.000	15.576.110.609	72,80	81,15
3.	SMKKN Makassar	19.630.500.000	15.152.227.268	77,19	84,99
4.	SMKKN Samarinda	18.689.880.000	15.071.334.624	80,64	80,89
5.	SMKKN Pekanbaru	20.717.000.000	14.808.692.294	71,48	71,69
<b>Jumlah A + B + C</b>		<b>315.259.023.000</b>	<b>243.419.848.131</b>	<b>77,21</b>	<b>78,40</b>

Berdasarkan hasil capaian pada Bulan Oktober 2018, Badan P2SDM memiliki prognosis realisasi hingga 97,42% atau sebesar Rp315.259.023.000,-. Prognosis tersebut merupakan hitungan perkiraan anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan hingga akhir tahun 2018. Setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM memiliki nilai prognosis yang berbeda. Secara terperinci prognosis tersebut tercantum pada Tabel 18 berikut.

TABEL 17. PROGNOSIS SATUAN KERJA LINGKUP BADAN P2SDM HINGGA DESEMBER 2018

No.	Satuan Kerja	Pagu	Prognosis s.d. Desember 2018	
			Rupiah	%
<b>A. Satuan Kerja Pusat</b>				
1.	Sekretariat Badan P2SDM	33.107.315.000,00	29.098.019.153,50	87,89
2.	Pusat Penyuluhan	10.854.600.000,00	10.831.805.340,00	99,79
3.	Pusat Renbang SDM	26.736.200.000,00	26.715.137.420,00	99,91
4.	Pusat Diklat SDM LHK	40.477.190.000,00	40.112.895.290,00	99,10
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL	13.125.190.000,00	12.608.057.514,00	96,06
<b>B. UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)</b>				
1.	BDLHK Bogor	14.100.000.000,00	13.964.640.000,00	99,04
2.	BDLHK Pematangsiantar	11.813.000.000,00	11.466.879.100,00	97,07
3.	BDLHK Samarinda	12.671.000.000,00	12.531.619.000,00	98,90
4.	BDLHK Makassar	15.242.775.000,00	14.851.035.682,50	97,43
5.	BDLHK Pekanbaru	14.350.000.000,00	14.183.540.000,00	98,84
6.	BDLHK Kadipaten	13.157.000.000,00	13.064.901.000,00	99,30
7.	BDLHK Kupang	11.725.800.000,00	11.709.383.880,00	99,86
<b>C. UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)</b>				
1.	SMKKN Manokwari	17.467.253.000,00	16.758.082.528,20	95,94
2.	SMKKN Kadipaten	21.394.320.000,00	21.064.847.472,00	98,46
3.	SMKKN Makassar	19.630.500.000,00	19.320.338.100,00	98,42
4.	SMKKN Samarinda	18.689.880.000,00	18.433.828.644,00	98,63
5.	SMKKN Pekanbaru	20.717.000.000,00	20.406.245.000,00	98,50
<b>Jumlah A + B + C</b>		<b>315.259.023.000,00</b>	<b>307.125.340.206,60</b>	<b>97,42</b>

# III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

## 3.1 STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Sesuai dengan RKP Tahun 2019, terdapat 5 Prioritas Nasional yang mendukung Pembangunan Indonesia. Melalui peran-perannya dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian LHK berperan dalam 4 Prioritas Nasional pada Tahun 2019. Dukungan Kementerian LHK tersebut melalui 13 program dan 105 kegiatan. Sesuai perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan, Badan P2SDM mendukung pencapaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui 17 Indikator Kinerja Kegiatan, dan 10 kegiatan diantaranya termasuk ke dalam 3 Prioritas Nasional.

Melalui program peningkatan penyuluhan dan Pengembangan SDM, terdapat 3 Prioritas Nasional yang didukung oleh Badan P2SDM yaitu:

- **(PN1) PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR;**
- **(PN3) PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA, DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA;**
- **(PN4) PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR.**

Alokasi total anggaran Prioritas Nasional pada Badan P2SDM adalah sebesar Rp82.329.204.000,-. Secara rinci, dukungan Badan P2SDM terhadap Prioritas Nasional 2019 tercantum pada tabel 18 berikut.

TABEL 18. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 PER PRIORITAS NASIONAL BERDASARKAN PAGU ANGGARAN

No.	Prioritas Nasional	Alokasi 2019 (Rp)
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	10.105.000.000,-
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	67.889.204.000,-
3	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	4.335.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>82.329.204.000,-</b>



Terdapat 5 kegiatan yang mendukung PN1, kegiatan ini termasuk ke dalam Program Prioritas **Percepatan Pengurangan Kemiskinan (PP1)**, Kegiatan Prioritas **Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial (KP5)** serta termasuk ke dalam Proyek PN 3 dan 4. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan bagi generasi muda lingkungan hidup, peningkatan kapasitas bagi tenaga pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH), peningkatan kelas bagi KTH serta pembentukan koperasi dan unit percontohan bagi KTH yang berada di sekitar hutan. Melalui kegiatan - kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat sekitar hutan dan KTH untuk dapat memiliki usaha mandiri sehingga taraf hidup dan nilai ekonomi masyarakat dapat lebih meningkat. Selanjutnya diharapkan akan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dapat lebih meningkat. Gambaran lebih rinci dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional pertama seperti pada gambar 3 dan Tabel 19 berikut.



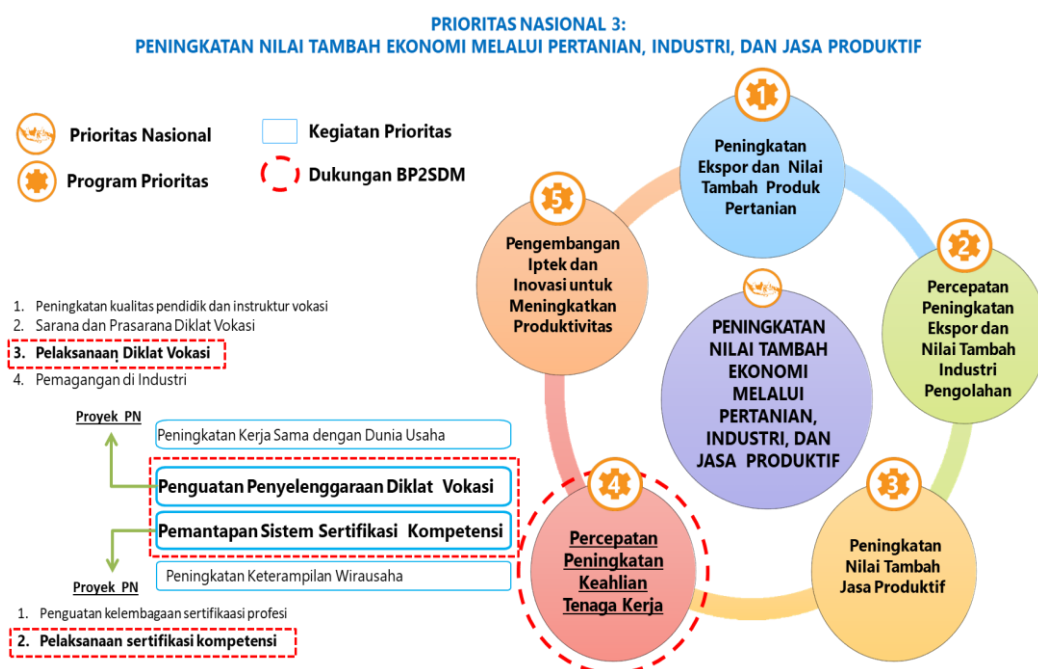
GAMBAR 3. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 1

TABEL 19. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 1

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial</b>	ProPN 3 – <b>Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya</b>	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH	1.800.000.000,-

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	ProPN 4 –	Jumlah generasi muda	3.165.000.000,-
		Lingkungan Hidup yang meningkat kapasitasnya	
		Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	3.300.000.000,-
		Jumlah unit Koperasi Kelompok Tani Hutan yang dibentuk	920.000.000,-
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	920.000.000,-
<b>Total</b>			<b>10.105.000.000,-</b>

Dukungan BP2SDM terhadap Prioritas Nasional ketiga (Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya) adalah melalui 2 kegiatan. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam Program Prioritas **Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja (PP4)**, Kegiatan Prioritas **Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi (KP2)** dan Proyek PN-3, serta termasuk ke dalam Kegiatan Prioritas **Pemantapan Sertifikasi Kompetensi (KP3)** dan Proyek PN-2. Kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan. Seperti tahun sebelumnya, kegiatan yang dilakukan adalah membentuk lulusan siswa SMKKN yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan. Melalui lulusan yang telah dihasilkan tersebut diharapkan mereka akan berkontribusi nyata dan kemajuan kehutanan di Indonesia dapat semakin meningkat. Selain itu, kegiatan lain yang mendukung prioritas nasional ketiga ini adalah melalui peningkatan kompetensi SDM LHK melalui uji sertifikasi dan kompetensi. Gambaran lebih rinci dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional ketiga seperti pada gambar 4 dan Tabel 20 berikut.



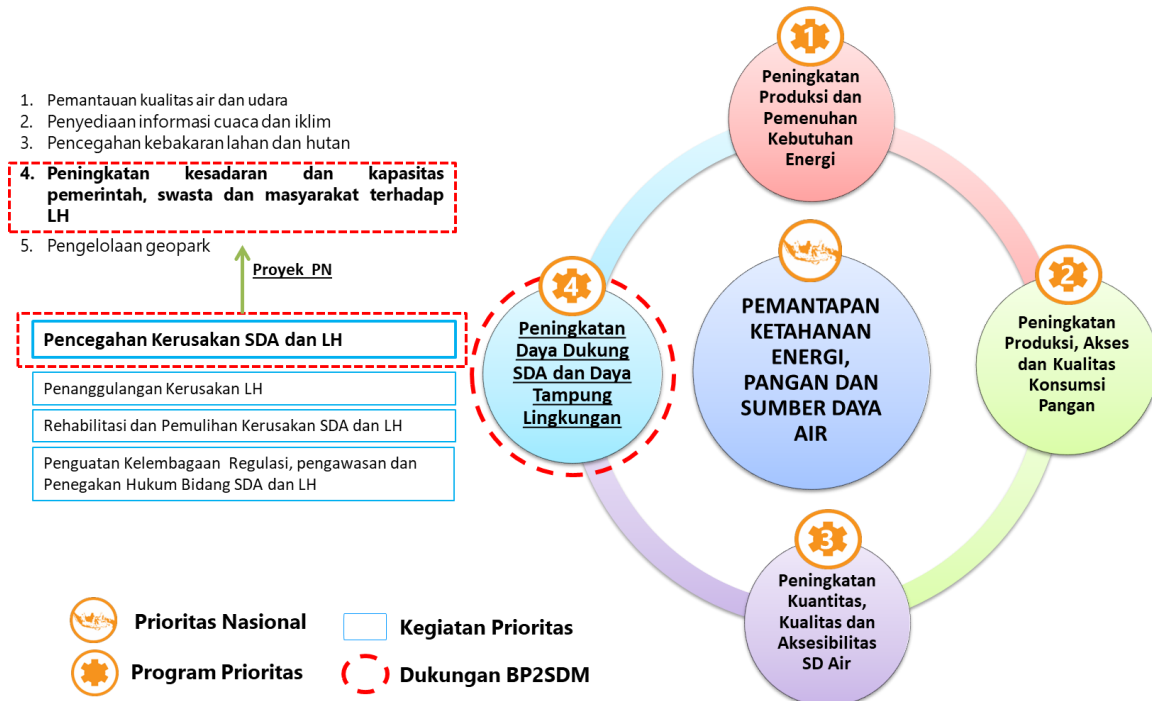
GAMBAR 4. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 3

TABEL 20. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 3

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi</i>	ProPN 3 – Pelaksanaan Diklat Vokasi	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	65.289.200.000,-
<i>Pemantapan Sertifikasi Kompetensi</i>	ProPN 4 – Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	2.600.000.000,-
<b>Total</b>			<b>67.289.200.000,-</b>

Pada Prioritas Nasional keempat (Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air), Badan P2SDM mendukung melalui 3 kegiatan. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam Program Prioritas **Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan (PP4)**, Kegiatan Prioritas **Pecegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (KP1)**, serta termasuk ke dalam Proyek PN-4. Melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan diharapkan masyarakat (kader LH, generasi muda LH, anggota saka kalpataru dan saka wanabakti) akan menjadi semakin sadar untuk menjaga lingkungan serta berdampak positif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Gambaran lebih rinci dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional keempat seperti pada gambar 5 dan Tabel 21 berikut.

**PRIORITAS NASIONAL 4:  
PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR**



GAMBAR 5. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 4

TABEL 21. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG Mendukung PRIORITY NASIONAL 1

Kegiatan Priority	Proyek PN	Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>Pecegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</i>	ProPN 4 – <b>Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup</b>	Jumlah kader Lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya	1.040.000.000,-
		Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2.341.000.000,-
		Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup	954.000.000,-
<b>Total</b>			<b>4.335.000.000,-</b>

Untuk mencapai keberhasilan tercapainya target – target yang telah ditentukan, telah disusun pula target rencana Triwulan kegiatan Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan dorongan bagi setiap satker dalam mencapai target – target yang telah disusun. Selain itu, pada Tahun 2019 juga diperoleh pendanaan melalui Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kegiatan pengembangan KHDTK di Kadipaten. Melalui pendanaan ini akan dibangun sarana prasarana di kawasan hutan diklat tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diklat serta tempat pelatihan atau praktek bagi siswa SMK Kehutanan. Melalui pembangunan ini diharapkan manfaat wilayah hutan diklat akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat pula.

Pada tahun 2019 fokus pengembangan SDM LHK juga dilakukan melalui pengembangan beberapa aplikasi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Pengembangan aplikasi yang mulai dikembangkan sejak tahun 2018 adalah pengembangan aplikasi *E-Learning* dan aplikasi Sistem Informasi Pendamping (SIMPING). Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk lebih memudahkan SDM LHK dalam mengakses informasi. Aplikasi *e-learning* bertujuan untuk memenuhi hak peningkatan kompetensi ASN minimal 20 Jam Pelajaran Per Tahun. Melalui aplikasi *e-learning* waktu pelatihan dapat menjadi lebih efisien serta akan berdampak dengan efisiensi penggunaan anggaran. Melalui aplikasi *e-learning* ini, peserta dapat belajar lebih mudah melalui aplikasi, serta dapat melaksanakan tes dan mendapat sertifikat elektronik. Aplikasi lain yang mulai dikembangkan adalah SIMPING. Aplikasi ini berisi informasi mengenai segala hal terkait kelompok tani hutan yang didampingi oleh penyuluh, mulai dari sebaran data KTH dan anggota, data pendamping, rencana kerja kelompok, sebaran potensi komoditi, hingga produk-produk yang dihasilkan oleh KTH. Sistem ini juga akan diintegrasikan dengan sistem aplikasi pada Perhutanan Sosial.

### 3.2 PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2019

Sesuai Renstra Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019 program Badan P2SDM adalah **PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM** dengan sasaran program **Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan**. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 4 (empat) target indikator kinerja program sesuai dengan Tabel 22 berikut.

TABEL 22. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2019

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2019
Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya 5.500 unit KTH dan Koperasi	130 unit KTH dan koperasi
Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten 25.400 orang	1.228 Orang
Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang.	4.148 Orang
Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya LH	2.340 orang 400 Unit Sekolah/Kampus

Untuk mencapai target pada IKP dan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada Tahun 2019, penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Lima kegiatan utama tersebut kemudian dijabarkan kembali melalui 17 indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Tabel 23 berikut atau secara lebih terperinci target kinerja kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran dokumen Rencana Kerja ini.

TABEL 23. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2019

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<b>Perencanaan dan Pengembangan SDM</b>  Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten	a) Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengelola KPH, <b>228 orang</b>
	b) Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya, <b>1.000 orang</b>

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<p><b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK</b></p> <p>Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>a) Jumlah kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya, <b>3.325 Orang</b></p> <p>b) Jumlah SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa (S2 dan S3), <b>75 orang</b></p> <p>c) Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, <b>7 unit KHDTK</b></p> <p>d) Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya, <b>300 orang</b></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b></p> <p>Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan</p>	<p>Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan, <b>448 orang</b></p>
<p><b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</b></p> <p>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup</p>	<p>a) Jumlah Kader Lingkungan Hidup Meningkatkan Kapasitasnya, <b>360 orang</b></p> <p>b) Jumlah Generasi Muda Lingkungan Hidup Meningkatkan Kapasitasnya, <b>1.200 orang</b></p> <p>c) Jumlah Sekolah/Kampus Yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, <b>400 Unit Sekolah/Kampus</b></p> <p>d) Jumlah Anggota Saka Kalpataru Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, <b>780 orang</b></p>
<p><b>Peningkatan Penyuluhan</b></p> <p>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</p>	<p>a) Jumlah Kelas Kelompok Tani Desa-Desa Hutan dari Tingkatan Pemula ke Madya, <b>110 unit</b></p> <p>b) Jumlah unit Koperasi Kelompok Tani Hutan yang dibentuk, <b>20 unit</b></p> <p>c) Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), <b>20 unit</b></p> <p>d) Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, <b>200 orang</b></p>
<p><b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b></p> <p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, SAKIP dengan nilai <b>84,00 poin</b></p>

Penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2019 didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp310.840.945.000,-** dengan rincian per sumber dana RM sebesar Rp297.324.345.000,-; HLN sebesar Rp4.657.000.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp8.859.600.000,-. Rincian alokasi anggaran berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 24 dan distribusi alokasi anggaran per masing-masing kegiatan pada satker pusat dan UPT lingkup Badan



P2SDM dapat dilihat pada Tabel 25 berikut. Melalui alokasi anggaran tersebut, diharapkan setiap satker dapat melaksanakan semua target yang direncanakan secara optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

TABEL 24. ALOKASI ANGGARAN BADAN P2SDM BERDASARKAN JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Jenis Belanja			Sumber Dana			Jumlah
Belanja Pegawai	Belanja Barang		RM	HLN	SBSN	
	Operasional	Non-Operasional				
109.271.574	43.052.0742	158.516.629	297.324.345	4.657.000	8.859.600	310.840.945

TABEL 25. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

No.	SATUAN KERJA	JUMLAH (Rp.)
<b>A. Unit Kerja Pusat</b>		
1	Sekretariat Badan P2SDM	30.315.181.000
2	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	15.205.194.000
3	Pusat Penyuluhan	10.919.500.000
4	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	13.518.940.000
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	52.554.509.000
<b>B. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)</b>		
6	BDLHK Pematangsiantar	10.451.745.000
7	BDLHK Pekanbaru	11.707.670.000
8	BDLHK Bogor	13.519.820.000
9	BDLHK Kadipaten	21.110.600.000
10	BDLHK Samarinda	11.279.300.000
11	BDLHK Makassar	14.992.118.000
12	BDLHK Kupang	10.968.850.000
<b>C. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)</b>		
13	SMKKN Pekanbaru	18.883.635.000
14	SMKKN Kadipaten	23.234.008.000
15	SMKKN Samarinda	17.762.551.000
16	SMKKN Makassar	19.491.623.000
17	SMKKN Manokwari	14.925.701.000
<b>Total BP2SDM</b>		<b>310.840.945.000</b>



◀ SISWA SMK KEHUTANAN KADIPATEN

## IV. PENUTUP

**P**enyusunan Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2019 ini menunjukkan bahwa Badan P2SDM berkomitmen untuk mendukung tercapainya program kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai tahun terakhir dari periode pembangunan



Indonesia Tahun 2015-2019, Badan P2SDM akan berusaha maksimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional Pembangunan Indonesia Tahun 2019 akan selalu dikawal pelaksanaannya sehingga keberhasilan dapat tercapai secara optimal.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM ini menjadi pedoman bagi setiap satker di lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan lingkup Badan P2SDM selama Tahun 2019. Oleh sebab itu, seluruh elemen penyelenggara pembangunan dan kegiatan di lingkup Badan P2SDM diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan memberikan kontribusi nyata untuk Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **V. LAMPIRAN**

# **Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
<b>I</b>	<b>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM			<b>30.315.181</b>								
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal		<b>84,00</b>	<b>pojn</b>									
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I				7.099.940	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				1.825.000								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				1.790.000								
	c. Pengelolaan kepegawaian				1.790.000								
	d. Pelayanan umum dan perlengkapan				1.694.940								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	23.215.241	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	a. Gaji dan Tunjangan				19.795.294								
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				3.419.947								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
<b>II</b>	<b>Perencanaan dan Pengembangan SDM</b>	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten			<b>15.205.194</b>								
1.	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH		<b>228</b>	<b>orang</b>									
	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH				10.730.740	Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua							
	Tanpa Sub Output												
	a. Perencanaan Bidang SDM Non Aparatur				10.130.740								
	b. Perencanaan Bidang SDM Aparatur				600.000								
2.	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya		<b>1.000</b>	<b>orang</b>			Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya				Ya

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya				2.600.000	Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat							
	Tanpa Sub Output												
	a. Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM LHK Pendukung KPH				1.800.000								
	b. Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK				800.000								
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I				500.000	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				500.000								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	1.374.454	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				1.374.454								
<b>III</b>	<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK</b>	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan			<b>140.384.612</b>								
1.	Jumlah kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya		<b>3.325</b>	<b>orang</b>								Anggaran Responsif Gender	



No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Jumlah SDM aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya				38.435.985	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							
	Tanpa Sub Output												
	a. Diklat Teknis dan Fungsional				17.458.868								
	b. Diklat Administrasi				9.294.000								
	c. Diklat Kepemimpinan				5.086.437								
	d. Pendukung Kediklatan				6.596.680								
2.	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)		75	orang									
	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)				2.100.000	Pusdiklat SDM LHK							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pendidikan program S2 dalam negeri				832.500								
	b. Pendidikan program S3 dalam negeri				938.500								
	c. Pengelolaan pendidikan lanjutan				329.000								
3.	Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan		7	unit									
	Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan				12.402.760	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							
	Tanpa Sub Output												

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	a. Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan				3.543.160								
	b. Pembangunan sarana prasarana laboratorium lapangan pendidikan vokasi kehutanan				8.859.600	*BDLHK Kadipaten (SBSN)							
4.	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya		300	orang									
	Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya				1.330.000	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							
	Tanpa Sub Output												
	a. Diklat teknis tenaga pendamping KTH				1.330.000								
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1	layanan	1.108.500	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda,							
	Tanpa Sub Output												
	a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				50.000								
	b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				724.832								
	c. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				333.668								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Layanan Perkantoran		1	layanan	85.007.367	Pusdiklat SDM LHK, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Makassar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang							
	Tanpa Sub Output												
	a. Gaji dan Tunjangan				61.790.966								
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				23.216.401								
<b>IV</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</b>	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan			<b>99.297.518</b>								
1.	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan		<b>448</b>	<b>orang</b>									
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia				65.289.204	SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari	Penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industry, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera		Anggaran Pendidikan	
	Tanpa Sub Output												
	a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan				52.568.983								
	b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008				215.000								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi	
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan				12.065.491									
	d. Publikasi pendidikan				220.950									
	e. Kerjasama pendidikan				218.780									
	Layanan Perkantoran		1	Layanan	34.008.314	SMKKN Pekanbaru, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari						Anggaran Pendidikan		
	Tanpa Sub Output													
	a. Gaji dan Tunjangan				23.771.314									
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				10.237.000									
<b>V</b>	<b>Penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan</b>	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup			<b>14.718.940</b>									
1.	Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya		<b>360</b>	<b>orang</b>										
	Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya				1.040.000	Jawa Barat (DAS Citarum), Jawa Timur (TN Gn. Bromo), Sulawesi Utara (TN Bunaken), DIY (TN Gn. Merapi), Kalimantan Selatan (DAS Barito), Jawa Timur (DAS Brantas), Jawa Tengah (DAS Bengawan Solo), Sulawesi Selatan (DAS Jeneberang), Sumatera Utara (DAS Asahan)	Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air					
	Tanpa Sub Output													
	a. Pelatihan kader lingkungan hidup				1.040.000									
2.	Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya		<b>1.200</b>	<b>orang</b>										

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Jumlah generasi muda lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya				3.165.000	Jawa Barat (DAS Citarum, Tasikmalaya, Bandung), Kalimantan Timur (DAS Mahakam, Balikpapan), Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah (DAS Bengawan Solo, Boyolali), Sumatera Utara (DAS Asahan), NTT, Jawa Tengah (DAS Serayu, Brebes), Jawa Timur (Malang, Madiun), 7 BDLHK (Pematangsiantar, Pekanbaru, Bogor, Kadipaten, Makassar, Samarinda, Kupang)	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar				
	Tanpa Sub Output												
	a. Pelatihan masyarakat				2.601.000								
	b. Pelaksanaan tata kelola bagian program dan umum				564.000								
3.	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya		400	unit									
	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup				2.341.000	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku	Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air				
	Tanpa Sub Output												
	a. Pembinaan tim penilai dan tim Pembina adiwiyata				600.000								
	b. Penilaian/evaluasi sekolah adiwiyata				1.200.000								
	c. Pemberian penghargaan adiwiyata				541.000								

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi	
4.	Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH		780	orang										
	Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup				954.000	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara	Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air					
	Tanpa Sub Output													
	a. Pelatihan saka kalpataru dan saka waabakti				954.000									
	Layanan Perkantoran		1	layanan	7.218.940									
	Tanpa Sub Output													
	a. Gaji dan Tunjangan				3.914.000									
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				3.304.940									
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Penyluluhan</b>	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			<b>10.919.500</b>									
1.	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya		110	unit										



No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribuan Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa huta dari tingkatan pemula ke madya				3.300.000	Riau, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar				
	Tanpa Sub Output												
	a. Peningkatan kelas KTH dari pemula ke madya				2.300.000								
	b. Pengembangan metode, materi, dan sarpras penyuluhan				1.000.000								
2.	Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk		20	unit									
	Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk				920.000		Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar				
	Tanpa Sub Output												
	a. Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi KTH				920.000								
3.	Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS)		20	unit									

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS)				920.000		Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar				
	Tanpa Sub Output												
	a. Pembentukan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS)				920.000								
4.	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan		200	orang									
	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/peyuluh handal bagi KTH				1.800.000	Riau, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar				
	Tanpa Sub Output												
	a. Pembinaan teknis peyuluh				1.200.000								
	b. Kolaborasi pendampingan dan pemetaan penyuluh kehutanan non aparat				600.000								
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I				2.479.500	Jakarta							
	Tanpa Sub Output												

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan rencana anggaran				1.825.000								
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				1.790.000								
	c. Pelayanan umum dan perlengkapan				1.694.940								
	Layanan Perkantoran		1	layanan	1.500.000	Pusat							
	Tanpa Sub Output												
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				1.500.000								



# PUSTAKA

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
2. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
3. Laporan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2017;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan P2SDM Bulan Oktober Tahun 2018





**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
Gedung Manggala Wanabakti Blok. I Lantai 14  
Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**Email: [setbp2sdm@menlhk.go.id](mailto:setbp2sdm@menlhk.go.id)/[badanppsdmk@gmail.com](mailto:badanppsdmk@gmail.com)**

**Telp. (021) 5730131, Fax. (021) 5730131**

**KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN  
KEMUTANAN**